

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹ Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, dalam arti bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan adalah manajemen pembiayaan.

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi perencanaan pembiayaan, pengorganisasian pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan.² Sumber-sumber pembiayaan pendidikan meliputi sisem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang dapat diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih soesifik mengenai pembiayaan pendidikan.³

Laporan data yang terkumpul dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menunjukkan bahwa selama tahun 2009-2014 sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pembiayaan pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp. 243,3 Miliar⁴. Kebocoran anggaran ataupun dalam bentuk paling parah seperti korupsi pendidikan menyebabkan berkurangnya anggaran dana pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dan menurunnya kualitas layanan pendidikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, dinas pendidikan dilaporkan telah melakukan 151 praktik korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 365,5 miliar. Ada 106 kasus dengan kerugian negara Rp. 248,5 miliar pada penggelapan. Sementara 59 kasus dengan kerugian negara Rp. 195,8 miliar⁵.

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 77.

² Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta : Raja Brafindo Persada, 2014), hlm. 4.

³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 7.

⁴ www.edukasi.kompas.com *Korupsi Dana Pendidikan*, (diakses tanggal 10 Maret 2017)

⁵ www.Sindonews.com *Pengelolaan Anggaran Pendidikan Rawan Korupsi*. (diakses tanggal 12 Maret 2017)

Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan menjadi sasaran empuk oleh oknum tertentu untuk dilakukan penyalahgunaan. Selain itu anggaran pendidikan yang dialokasikan ke lembaga pendidikan perlu diawasi dan dilakukan monitoring dalam penggunaannya. Manajemen pembiayaan yang dilakukan dengan tidak transparan menimbulkan banyak kecurigaan yang berakibat pada keberlangsungan lembaga pendidikan. Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam mengawasi manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan dapat menimbulkan tindakan penyelewangan anggaran. Manipulasi laporan keuangan juga menjadi salah satu masalah dalam proses manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan.

Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis lembaga pendidikan. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*Instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggran pendidikan⁶. Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen pembiayaan yang bagus. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan..

Kondisi empirik menunjukkan bahwa penerimaan dana pendidikan sesungguhnya belum dapat memenuhi tuntutan operasional secara ideal. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal yang mempengaruhi penyediaan dana pendidikan seperti terbatasnya dana pemerintah, kebijakan pajak pendidikan belum ditetapkan, kemampuan masyarakat khususnya orang tua masih bervariasi pendapatannya dibandingkan pengeluaran yang harus ditanggulangnya, demikian pula pihak swasta masih belum banyak yang peduli terhadap sumbangan finansial penyelenggaraan pendidikan.

⁶Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2010), hlm. 3.

Memperhatikan hal tersebut, dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan yang paling kompleks adalah di perguruan tinggi. Dimana pendidikan diklasifikasikan berdasarkan konsentrasi bidang keilmuan tertentu. Maka sangat wajar apabila perguruan tinggi menjadi pusat perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah salah satu peran dan fungsi perguruan tinggi.

Dengan menyangkut peran yang sangat penting tersebut tentunya perguruan tinggi harus menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Sekaligus mampu menjawab segala bentuk tantangan selaras dengan kepentingan rakyat banyak. Peran *agent of change* dapat dijadikan alternatif parameter berdasarkan ideologi perguruan tinggi atau lebih dikenal dengan *Tri Darma Perguruan Tinggi* yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan *Tri Darma Perguruan Tinggi* tersebut tentunya memerlukan banyak biaya dan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standar pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi sebagaimana disebutkan di dalam PP Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyatakan bahwa standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) dalam konteks pembiayaan pendidikan mendapat bagian kecil dari pemerintah, karena pembiayaan atau pendanaan bagi satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat, satuan pendidikan yang bersangkutan⁷. Dalam UU Nomor 12 tahun 2012 dijelaskan bahwa pemerintah tidak berkewajiban memberikan biaya operasional untuk perguruan tinggi swasta serta membayar gaji dosen dan tenaga kependidikannya. Karena itulah maka jumlah bantuan yang diberikan pemerintah kepada PTKIS berbeda.

Persoalan dana merupakan persoalan yang penting dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, yang mana dana merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan⁸. Berdasarkan hasil kajian, banyak permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan PTKIS terkait dengan pembiayaan

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jogjakarta:Arusmedia, 2010), hlm. 229.

⁸ Gunawan Sudarmanto, *Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bhineka Karya, 2012), hlm. 2.

pendidikan, diantaranya: (1) sumber dana terbatas⁹, (2) pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana yang tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan¹⁰, (3) kurangnya bantuan pemerintah akibat otonomi daerah, dengan berlakunya otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan.

Masalah pembiayaan harus dipecahkan jika ingin mendapatkan peluang yang maksimal bagi semua penyelenggaraan pendidikan agar dapat berkembang. Untuk pengembangan program PTKIS secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelolaan lembaga pendidikan. PTKIS dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan sehingga sumber daya yang berupa uang dapat diberdayakan secara optimal¹¹, program yang telah direncanakan harus berjalan sesuai dengan rencana, semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka semakin banyak dana yang dibutuhkan¹².

Di Kota Sukabumi terdapat beberapa PTKIS yang sedang berkembang salah satunya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi atau yang lebih dikenal dengan STAI Sukabumi. STAI Sukabumi berdiri pada 4 Maret 1974 di bawah naungan Yayasan Pembangunan Sukabumi, pada tahun 2016 jumlah mahasiswa di STAI Sukabumi adalah 2.146. Sumber pembiayaan di STAI Sukabumi berasal dari mahasiswa dan sumbangan pihak yayasan, dengan biaya mahasiswa persemester adalah Rp 1.200.000 maka dana yang diperoleh STAI Sukabumi persemester dari mahasiswa adalah 2.146 mahasiswa dikali Rp 1.200.000 yaitu Rp 2.575.200.000, sedangkan sumbangan dari pihak yayasan tiap tahun berbeda disesuaikan dengan kekurangan dana yang dibutuhkan oleh STAI. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan diantaranya untuk honor dosen dan biaya kegiatan persemester dan tahunan. Sedangkan untuk biaya pembangunan gedung pendidikan, biaya perawatan gedung dan sebagainya dana tersebut sangat tidak mencukupi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) STAI Sukabumi.

Berdasarkan data awal yang didapatkan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di STAI Sukabumi dalam masalah manajemen pembiayaan, Untuk memudahkan dan

⁹ H.A.R Tilar. *Membebani Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 66.

¹⁰ Abu Bakar & Taufani C, *Manajemen Keunagan dalam Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta ,2009), hlm. 256.

¹¹ Gunawan Sudarmanto, *Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bhineka Karya, 2012), hlm. 4.

¹² Syaiful bahri & Aswan Zain, *Strategi Perencanaan Mengajar*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm. 38.

terarahnya penelitian, peneliti merumuskannya dalam judul penelitian sebagai berikut: *Manajemen Pembiayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta studi kasus di sekolah tinggi agama Islam Sukabumi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar alaminya Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi ?
2. Bagaimana perencanaan pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi ?
3. Bagaimana pengorganisasian pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi ?
4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi ?
5. Bagaimana pengawasan pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar alaminya Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi
2. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengorganisasian pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi .
5. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama yang berperan dalam dunia pendidikan, Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk menjadi bahan kajian dan bahan penelitian selanjutnya. Terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, bagaimana manajemen pembiayaan PTAIS, karena pelaksanaan pembiayaan itu sulit untuk ditemukan di perguruan tinggi lainnya. Sehingga hal ini bermanfaat bagi praktisi pendidikan di perguruan tinggi.
2. Secara praktis: untuk memberikan gambaran tentang efektif dan efesienya dalam pengelolaan pembiayaan dan dapat memberikan pengetahuan, upaya untuk memajukan lembaga pendidikan menjadi bermutu. Dapat memberikan konsep serta analisa tentang

pentingnya mengelola dana yang ada untuk meningkatkan mutu sehingga bisa menarik minat masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kata biaya dalam pendidikan jika diimplementasikan merupakan sebuah proses sehingga disebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dari kata asli biaya ditambah awalan *pe* dan akhiran *an*. Thomas H. Jones menyatakan Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikbertakan upaya pendistribusikan benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan¹³.

Nanang Fatah mengutarakan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan¹⁴. Dari pengertian di atas pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kegiatan dalam pendidikan baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.

¹³ Mulyono, *Pembiayaan pendidikan*, (Jakarta: Bina Cipta, 2010) , hlm. 77.

¹⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 23.

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana prasarana. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil). Biaya untuk personil antara lain untuk kesejahteraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya nonpersonil berupa pengadaan bahan dan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran.

Suatu lembaga untuk memiliki tenaga kependidikan yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan memerlukan biaya rekrutmen, penempatan, penggajian, pendidikan dan latihan, serta mutasi. Dalam usaha pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit, bahkan setelah diadakan maka diperlukan dana untuk perawatan, pemeliharaan, dan pendayagunaannya. Meskipun ada tenaga, ada sarana dan prasarana untuk memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal perlu biaya operasional baik untuk bahan dan ATK habis pakai, biaya pemeliharaan, maupun pengembangan personil agar menguasai kompetensi yang dipersyaratkan.

Dari uraian di atas jelas bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan perlu biaya, paling tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan minimal. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara operasional yang dimaksud penulis dalam judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi) adalah suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh keterangan dan data-data mengenai bagaimana latar alamiah, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan dan pengawasan dalam manajemen pembiayaan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi.

Perencanaan pembiayaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk mengatur perencanaan sumber daya pada masa yang akan datang. Setelah perencanaan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan pembiayaan secara berdaya guna dan dengan kebijakan yang sah. Tindakan yang berdaya guna dapat diukur dari kemampuan menggunakan sumber daya secara efisien untuk memperoleh hasil yang maksimal, sedangkan dengan kebijakan yang sah dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam merancang dan menyusun perencanaan pembiayaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya masalah efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi. Efektivitas pembiayaan merupakan faktor penting yang senantiasa diperhitungkan bersamaan dengan efisiensi. Artinya, suatu program kegiatan tidak hanya menghitung waktu yang singkat, tetapi tidak memperhatikan anggaran yang harus dikeluarkan seperti biaya operasional dan dana pemeliharaan sarana yang mengarah pada pemborosan. Semua pihak yang terlibat dalam menentukan anggaran pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.

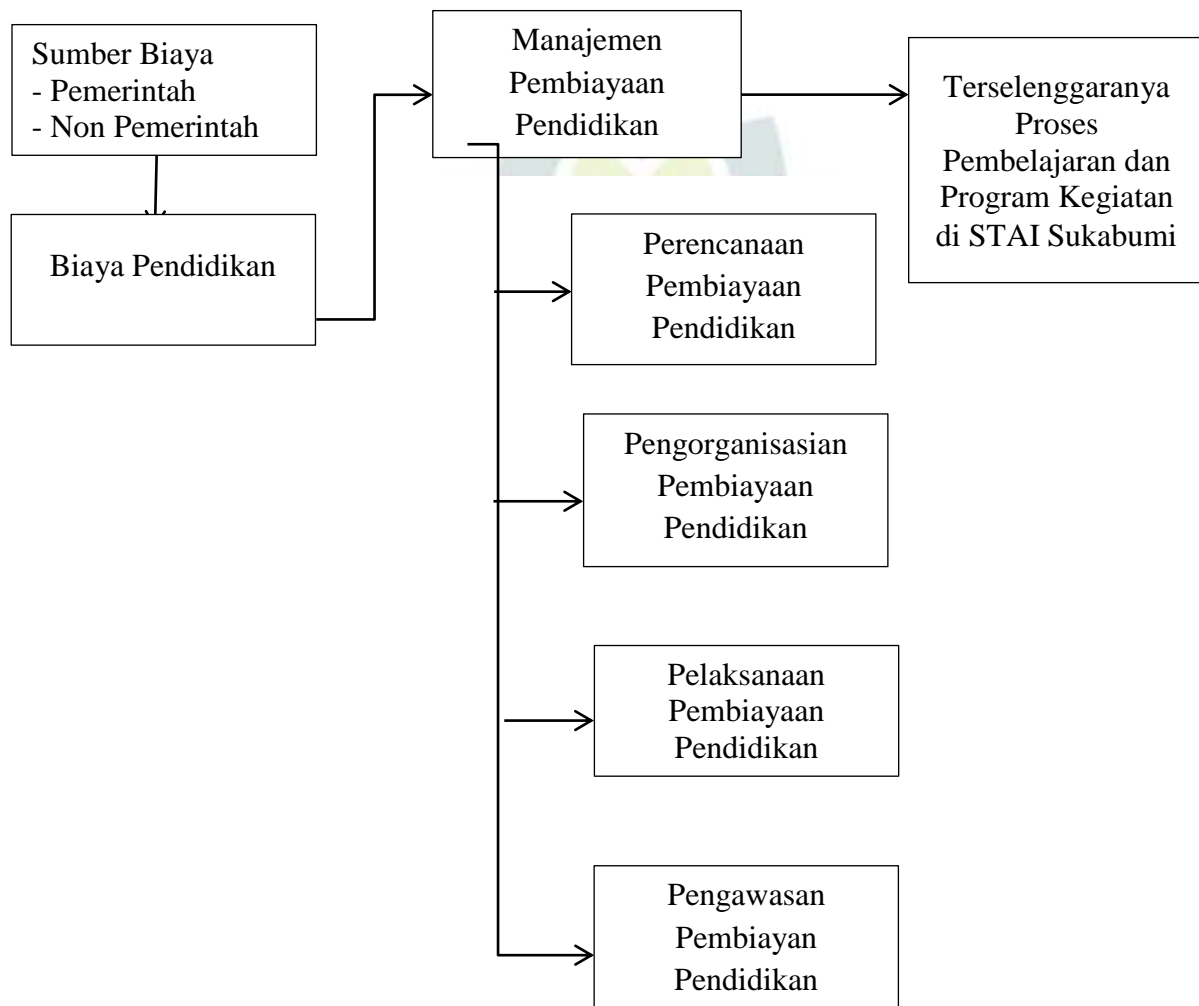
Dalam melakukan pengorganisasian pembiayaan pendidikan tersebut harus digolongkan menurut suatu aturan tertentu yang baku dan transaksi-transaksi pembiayaan yang dilakukan harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Kegiatan ini disebut sebagai akuntansi dalam pembiayaan pendidikan. Setelah akuntansi selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan yang harus dilakukan secara preventif dan kuratif.

Penelitian yang dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi ini, didasarkan bahwa dibandingkan dengan perguruan tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dituntut untuk lebih *manageable* dalam hal mengembangkan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitas pendidikannya. Karena itu, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang dikelola secara tepat arah dapat menjadikan dirinya sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta untuk sebagian besar bahkan hampir seluruhnya bersumber dari dana masyarakat dalam hal ini peserta didik.

Akuntabilitas dan siasat perolehan dana dari sumber lain, menjadi penting untuk memelihara kelangsungan dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Dengan kata lain, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta harus memiliki strategi yang cerdas untuk membiayai penyelenggaraan pendidikannya. Pada tataran operasionalnya, strategi yang dimaksud terkait dengan latar alamiah lembaga pendidikan, perencanaan pembiayaan pendidikan, pengorganisasian pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan serta pengawasan pembiayaan pendidikan terhadap sumber-sumber dan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan sehingga kinerja sistem pendidikannya senantiasa terjamin.

Untuk lebih ringkasnya, kerangka berpikir penelitian ini dapat penulis sajikan seperti di bawah ini :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Manajemen Pembiayaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta



Sumber hasil penelusuran, diolah 2017

F. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian “*Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella)*”, Rachman Firdaus (PPS UPI Bandung, 2014) Penelitian yang dilakukan oleh Rachman Firdaus ini adalah menjelaskan tentang bagaimana sebuah lembaga swasta dalam mencari sumber biaya untuk kelangsungan lembaga pendidikan swasta dimana paling besar sumber penerimaan pembiayaan adalah dari SPP siswa yang mengikuti kursus dan sedikit bantuan dari pihak swasta. Manajemen pembiayaan yang diterapkan di lembaga pendidikan bahasa asing seperti LIA, MMC, ELS dan Cinderella adalah bertolak dari kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penyediaan dana pendidikan lembaga swasta maka diperlukan suatu strategi yang tepat dan cermat dari pihak pengelola. Strategi yang dibutuhkan dalam menggali dana harus dilandasi oleh kemampuan manajerial, komitmen pihak terkait, dan kepercayaan yang tinggi dari semua masyarakat yang dilayani. Faktor-faktor perhitungan anggaran pendidikan, sangat kompleks karena adanya harga patokan dan pengaruh tingkat inflasi juga faktor ekonomi secara makro, seperti sosial ekonomi masyarakat, krisis moneter, tingkat inflasi, dan bencana alam, yang menimbulkan kelangkaan barang keperluan pendidikan, sehingga anggaran berubah dengan tingkat ketidakpastian. Sedangkan pemasukan dan pengeluaran dituntut seimbang, sesuai dengan acuan pemerintah, oleh sebab itu diperlukan suatu perhitungan yang mengarah kepada pendekatan kepastian anggaran¹⁵.

Judul penelitian “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Universitas Islam Malang*” Junaidi (PPS UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013) Hasil dari penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan dimana yang pertama adalah perencanaan anggaran pendidikan Universitas Islam Malang (UNISMA) disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT dengan menuangkan program-program beserta anggaran untuk masing-masing program. Yang diadakan pada sebulan sebelum tahun ajaran baru yang diadakan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan stakeholders kampus, dan keputusan rapat yang sudah di sepakati dan diputuskan oleh ketua yayasan. Strategi Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) ada 4 bentuk strategi yang digunakan yakni: a. strategi unit kerja mandiri, b. sumbangan dana dari yayasan dan mahasiswa, c. memiliki link dengan luar negeri, dan d. pengajuan proposal kepada pemerintah. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan

¹⁵ Rachman Firdaus, *Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan swasta Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing LIS, MMC, ELS dan Cinderella*, (Tesis, UPI Bandung, 2014).

Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang dilakukan melalui empat (4) tahap yakni: 1) Evaluasi hasil kegiatan selama setahun / persemester, 2) Evaluasi hasil kinerja pegawai melalui program-program. 3) Evaluasi dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi. 4) Evaluasi analisis SWOT meliputi hasil analisa internal dan eksternal¹⁶.

Jurnal penelitian "*Financing Of Education, A Theoretical Study*" Ferdi W.P (Jurnal Penelitian kemendikbud, 2006). Jurnal ini menjelaskan tentang untuk faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, jenis biaya pendidikan; dan model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kajian ini dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan biaya pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, antara lain: a) kenaikan harga; b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi; g) adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan h) belum ada model pembiayaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi biaya pendidikan; 2) jenis-jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung; b) biaya tidak langsung; c) biaya pribadi; d) biaya masyarakat; e) *monetary cost*; dan f) *non monetary cost*; dan 3) model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien yaitu model human capital di mana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi taraf produktivitas yang dapat mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan¹⁷.

Judul penelitian "*Pengelolaan Biaya Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Darul Mutaalimin*" Harsono (STAIN Surakarta, 2011). Yang menarik dari penelitian ini adalah tentang biaya pendidikan di sekolah meliputi serangkaian kegiatan sekolah, pendapatan sekolah, biaya-biaya yang harus dibayar pada waktu tertentu dan pada waktu yang akan datang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan sekolah dalam menyusun pembiayaan meliputi kegiatan dan program yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah dari waktu ke waktu secara

¹⁶ Junaidi, *Manajemen Pembiayaan di Universitas Islam Malang (UNISMA)*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2013).

¹⁷ Ferdi, WP. "Financing Of Education : A Theoretical Study". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19 Nomor 4 (Desember 2013), hlm. 565-578.

transparan, akuntabel dan responsibel. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan dan pemeriksaan. Dalam kegiatan umum pembiayaan, kegiatan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan) dan *auditing* (pemeriksaan). Dari segi perencanaan pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini meliputi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran mengidentifikasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan finansial, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi anggaran dan pengesahan anggaran. Sedangkan dari segi pelaksanaan anggaran pendidikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harsono ini meliputi melakukan analisis internal dan eksternal terhadap potensi sumber dana, mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan, Menetapkan sumber dana melalui musyawarah dengan orangtua didik pada tahun ajaran, menggalang partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. Dan kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah *auditing* yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain pengawasan juga dilakukan evaluasi

18

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, dalam tesis ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti manajemen pembiayaan dalam kaitannya dengan proses perencanaan pembiayaan, pengorganisasian pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan di lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam swasta sebagaimana judul tesis yang telah diajukan di atas.

¹⁸ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Darul Mutaalimin* (Tesis STAIN Surakarta, 2011)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG